

Kolonialisme, Pengetahuan Barat, dan Masa Depan Desa: Refleksi Sosiologi Pedesaan dan Metodenya

Ivanovich Agusta
(Sosiolog Pedesaan IPB University)

Mempertimbangkan diskursus orientalisme sudut pandang Barat atas masyarakat Timur, atau balasannya dalam oksidentalisme sudut pandang Timur atas politik masyarakat Barat, mula-mula mengandung resiko bahwa kedua karang produksi pengetahuan itu muncul ke permukaan dan terwujud dalam diskursus baru.¹ Namun, resiko ini tetap diambil, agar metode dan produk ilmu pengetahuan sosiologi pedesaan di Indonesia dapat dikonstruksikan; dengan kesadaran resiko memunculkan konstruksi hibriditas sosiologi pedesaan. Setidaknya, sebagaimana yang dibahas dalam tulisan ini, seturut pengalaman pengembangannya oleh Sajogyo dan kolega-koleganya.

Kuasa Kolonialisme dan Desa

Sapuan kanvas lanskap pedesaan nusantara pada periode kolonial –kita coba putuskan mulai 1808-1945,² sambil menyadari ada bias penekanan waktu penjajahan di tanah Jawa—pada awalnya digambarkan dan dituliskan oleh jari jemari seniman Barat pada lukisan Mooi Indie, birokrat Barat dalam sensus dan pengelolaan pribumi, serta akademisi Barat dalam penelitian dan penulisan laporan. Struktur penjajahan dibangun atas peneguhan ras Barat di atas posisi ras lainnya (Arab, Timur Jauh, dan pribumi): yang muncul adalah diskursus ras Barat, sambil me-lain-kan (*othering*) ras lain. Ini mendasari diskursus Barat dalam posisi penguasa yang menjajah ras lain, terutama pribumi –bahkan termasuk tubuh kreol yang masih mengandung pencampuran pribumi ke dalam Barat (Baay, 2010).

Diskursus orientalisme dalam mengonstruksi fakta dan teori sosial disusun dalam sensus penduduk awal yang me-liyan-kan (*othering*) sehingga menghindari cacah jiwa pribumi (Baay, 2010; Gouda, 2007). Bagi petani dan desa, orientalisme adalah konsekuensi tekanan kekuasaan terhadap studi botani di Kebun Raya Bogor (Goss, 2014), yang diikuti dengan

¹ Disadari, memunculkan diskursus beresiko menguatkan kekuasaan di dalam diskursus itu; bahkan sebenarnya merespons diskursus pun –termasuk mengritiknya—turut menguatkan diskursus itu (Foucault, 2003).

² Daendels sebagai wakil penjajah Perancis menguasai Kerajaan Mataram di Yogyakarta pada 1808, dan penjajahan Jepang selesai saat Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945.

metode demonstrasi untuk penyuluhan petani di sekitar kebun raya. Kuasa pemerintahan penjajah menentukan jenis tanaman yang diteliti lalu didemokan, lahan yang digunakan, dan petani yang dipilih.

Untuk pengembangan ilmu sosial, jejak orientalisme tercatat pada laporan ilmiah dan buku akademis. Topik arus utama yang disajikan ialah sisi positif kolonial dan superioritas Barat untuk menjalankan misi memperadabkan pribumi, dibandingkan primitifisme kehidupan (termasuk kanibalisme), budaya malas, keliaran dan konflik yang tidak selesai pada pribumi (Alatas, 1988; Breman, 1997).

Di samping dinamika persaingan golongan liberal dan konservatif di Belanda sendiri, di negeri jajahan nusantara juga hadir penulis kritis menafikan orientalisme. Novel *Max Havelaar* (Bel, 2024; Multatuli, 1972) menghadirkan kehidupan pribumi, sekaligus kritik atas metode kolonialisme mengeraskan hierarki sosial berbasis ras kemudian jabatan berbasis tradisi lokal patronase.

Kelonggaran struktur penjajahan dalam periode Politik Etis 1900-an sempat dimanfaatkan untuk mengkaji pemikiran kritis dari Barat sendiri, seperti organisasi modern dalam lembaga ekonomi dan politik, gerakan pemogokan, lembaga koperasi, hingga pandangan Karl Marx dan komunisme. Novel-novel Pramoedya Ananta Toer menangkap elan pribumi dalam merespons zaman baru ini,³ termasuk peran dinamis perempuan pribumi.⁴ Pengetahuan dari khasanah Islam lintas negara juga hadir. Di samping ada yang hendak menjalankan semurni pemikiran Barat kanan dan kiri, serta Islam, namun perkembangan sejarah pergerakan lebih digerakkan tokoh-tokoh yang melokalkannya sesuai kondisi sosial nusantara.

Untuk konteks tulisan ini, penting menghadirkan peran pegawai kolonial yang lazimnya beralih menjadi akademisi kritis –yang dari karyanya Sajogyo memilih mengembangkan keilmuan Sosiologi Pedesaan. Perlu disebut terutama BJO Schrieke (2016a, 2016b) yang menghadirkan sosiologi (mungkin ada baiknya mengontraskan etnologi/Indologi pada masa yang setara itu, di mana para etnolog/Indolog cenderung mendukung kolonialisme dengan memberikan rekomendasi subversif atas kelemahan masyarakat nusantara⁵). Schrieke menulis dengan ciri khas memasukkan sejarah sosial dari sudut pandang warga (bukan elite)

³ Tetralogi Buru, terdiri atas novel berjudul Bumi Manusia (2002), Anak Semua Bangsa (2002), Jejak Langkah (2002), dan Rumah Kaca (1988), serta buku Sang Pemula (2003).

⁴ Novel berjudul Gadis Pantai (2000) serta buku Panggil Aku Kartini Saja (2003).

⁵ Contohnya 11 jilid buku berisi rekomendasi C. Snouck Hurgronje kepada pemerintah Hindia Belanda sepanjang tahun 1889-1936 (Gobee dan Adriaanse, 1990a, 1990b, 1990c, 1991a, 1991b, 1992a, 1992b, 1993a, 1994a, 1994b, 1995

nusantara sendiri (bukan sudut pandang penjajah). Ia memanfaatkan teori-teori Max Weber untuk meneropong fakta sosial di pedesaan dalam jangka waktu panjang alias sejarahnya, kemudian menjelaskannya melalui lensa pribumi, sehingga menghasilkan pengetahuan baru yang lebih lekat dengan kondisi lapangan. Tegasnya, Schrieke melokalkan *grand theory* sosiologi melalui studi sejarah sosial warga. Hibriditas teori dikembangkan dari sudut pandang warga pribumi yang dirugikan oleh struktur penjajahan, sehingga mengarahkan Schrieke untuk mengritik beragam aspek kolonialisme yang dijalankan bangsanya sendiri.

Kemerdekaan dan Sosiologi Pedesaan

Ilmuwan sosial kritis berikutnya WF Wertheim. Segera setelah pulang ke Belanda, pada tahun 1946 ia mengusulkan negerinya segera menerima kemerdekaan Indonesia. Setelah menempati posisi *professorship* di Universitas Amsterdam, Belanda, ia menguatkan lingkungan akademik sosiologi dan sejarah, memutus pendekatan orientalisme dalam memandang sejarah negara-negara yang baru saja terbebas dari kolonialisme (Breman, 2024). Lembaganya menerjemahkan tulisan-tulisan Schrieke yang telah dipublikasi maupun yang berupa naskah, dari bahasa Belanda ke bahasa Inggris. Menurutnya, sosok penting lainnya pendukung pengetahuan dari ranah warga pribumi ialah JC van Leur —yang wafat muda dalam perang melawan tentara Jepang di Laut Jawa—sehingga tulisan-tulisannya juga dipublikasikannya (van Leur, 2015).

Wertheim sendiri mempublikasi tulisan kritis yang diolah dari pelokalan teori Marx terutama tentang perubahan sosial di Indonesia, yang mengangkat peran warga masyarakat (Wertheim, 1999). Ia juga memaknai revolusi bukan sekedar perubahan sosial yang cepat lagi netral, namun yang penting ialah sebagai emansipasi masyarakat belahan bumi Selatan (Wertheim, Tt). Dapat dirumuskan metodenya dimulai dari selektif terhadap teori Barat (yaitu memilih yang kritis), mencek kondisi lapangan Indonesia melalui laporan maupun kerja lapangan, kemudian menyusun rumusan baru teori kritis berbasis fakta Indonesia. Karena itu, selain meneruskan pentingnya pelokalan teori sosial dan sejarah sosial (sejarah golongan bawah), tulisannya juga menekankan pentingnya pengalaman lapangan (kelak Sajogyo pun sangat menekankan pengalaman lapangan sebagai indikasi kuatnya keilmuan sosiologi pedesaan seorang akademisi). Wertheim sempat membandingkan seorang sosiolog Indonesia yang tidak peka di lapangan sehingga menggali fakta yang salah, dengan ilmuwan sosial lain yang lebih peka sehingga lebih mampu menggali fakta di antara warga (Wertheim, 2009).

Kekejaman penjajah sepanjang pendudukan Jepang (1942-1945) serta tentara Belanda selama Revolusi Fisik (1945-1949) (Ibrahim, 2023; Kano, 1993) kiranya efektif menghabisi ikatan ketundukan kepada penjajah. Rezim Soekarno (1945-1966)⁶ diawali dengan perang Revolusi Fisik itu, lalu langkah penataan kenegaraan yang cenderung terbuka, mandiri di antara kutub Perang Dingin Amerika Serikat dan Uni Soviet, namun kesulitan anggaran untuk melaksanakan pembangunan (Bevins, 2023; Neelakantan, 2017). Sepanjang periode ini bisa dicatat upaya pelokalan konsep-konsep besar dari Barat dijalankan Soekarno sendiri, seperti marxisme untuk petani kecil bertajuk marhaenisme.

Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda, pada dekade 1950-an Wertheim mengadakan perjalanan ke berbagai wilayah di Indonesia. Ia menggunakan pendekatan antropologi kala meriset desa-desa. Dalam muhibah itu, ia juga menjadi guru besar tamu di Universitas Indonesia di bidang kependudukan, dan sempat membimbing hingga meluluskan ujian doktoral Sajogyo. Pada waktu yang sama, di IPB sendiri staf bernama Cunningham juga mempelajari kependudukan desa-desa di Jawa Barat. Pola sosiologi sejarah yang sudah dimulai Schrieke, kemudian dilanjutkan Wertheim, hingga pada mahasiswanya, Sartono Kartodirjo (Purwanto, 2016).

Kita patut menduga⁷ nuansa nasionalisme yang membuncuh semasa kemerdekaan, sekaligus kritik kepada Belanda yang semakin kejam selama Revolusi Fisik 1945-1949, membuat Sajogyo menjatuhkan pilihan sosiologi pedesaan untuk mengisi peran ilmu sosial dalam ilmu pertanian di Institut Pertanian Bogor (IPB University). Kita bisa menduga Sajogyo mengamati pemanfaatan beragam ilmu pengetahuan untuk mengembangkan sosiologi pedesaan, setidaknya mencakup sosiologi, sejarah, antropologi, dan kependudukan. Sebagai catatan kritis, hingga saat ini beragam ilmu sosial itu memang diramu dalam perkuliahan (sehingga kapasitas meramu pengetahuan hibrid menjadi penting), namun tidak mencakup ilmu sejarah (mungkin karena sulit menjangkau data-data sejarah berbahasa Belanda, Jepang, Perancis, juga data-data sejarah lokal). Ramuan perkuliahan itu sendiri disusun dari kajian bacaan-bacaan sosiologis (bukan jalur akademis sosiologi murni) dan hasil kajian lapangan; kiranya inilah strategi yang relatif mencipta ruang hibridisasi sosiologi pedesaan sekaligus membebaskan dari tekanan kanon-kanon sosiologi klasik dan modern.

⁶ Tahun 1966 sebagai akhir kekuasaan faktual Soekarno, sedangkan secara legal kekuasannya baru berpindah ke Soeharto pada tahun 1968.

⁷ Sebenarnya semasa hidupnya, pada periode 1997-2004, Sajogyo berkali-kali menjelaskan kepada penulis peran tulisan-tulisan Schrieke dalam membulatkan keputusannya memilih jalur keilmuan sosiologi pedesaan.

Lingkaran pemikiran kritis Wertheim terus berlanjut, setelah salah satu asistennya di Universitas Amsterdam, SMP Tjondronegoro, bergabung dalam satu departemen bersama Sajogyo di IPB Bogor pada awal 1960-an (Tjondronegoro, 2008). Berikutnya, seorang lulusan Universitas Amsterdam turut bergabung pada 1980-an (Sajogyo, 2006).

Struktur sosial rezim Soeharto (1966-1998) berbeda, bahkan berlawanan, dari rezim Soekarno, bandul negara lebih mendekati Amerika Serikat⁸ (termasuk aliran dana untuk proyek pembangunan, kiriman buku-buku pengajaran, tenaga ahli alias ilmuwan). Dalam konteks Perang Dingin dan usai pembunuhan massal 1965-1966, pemikiran kritis sangat dibatasi, bahkan pemikiran Marx dan Lenin dilarang. Jika disadari tradisi sosiologi tentang Indonesia sebagaimana dikembangkan Schrieke dan Wertheim di atas basis pemikiran kritis, maka larangan mendalami teori-teori kritis menggoyang posisi sosiologi pedesaan. Apalagi, Rezim Soeharto mampu mempertahankan kekuasaan sepanjang 30-an tahun dengan kondisi relatif tenang, maka selalu muncul tekanan menundukkan ilmuwan sosial di bawah kuasa pemerintah.

Sosiologi pedesaan sendiri berkembang di antara kajian atas proyek-proyek pembangunan dan pelembagaan dalam pendidikan (Kolopaking, Tonny, Hakim, 2021; Sajogyo, 2006). Keikutsertaan Sajogyo dan tim dalam proyek pembangunan sempat dijadikan indikasi ketundukan ilmuwan sosial pedesaan terhadap kekuasaan (White, 2005). Untuk membahasnya, pertama, bagi yang berpengalaman dalam pemerintahan atau mengikuti proyek-proyek kajian, dapat dibedakan antara proyek kajian asal-asalan untuk mendanai kebutuhan non bujeter –sebagian untuk korupsi, dan proyek untuk kebutuhan substansi kebijakan. Sajogyo dan tim jelas memilih dan mengerjakan jenis proyek terakhir.⁹ Indikasinya, rekomendasinya memang digunakan dalam menyusun kebijakan UPGK (Usaha Peningkatan Gizi Keluarga), survei agroekonomika untuk memperbaiki penyuluhan dan strategi peningkatan pendapatan petani (Sajogyo, 2006).

Kedua, proyek dijadikan strategi sebagai pengembangan ilmu sosial pada era poskolonial di dalam negeri yang membatasi diskusi ilmu pengetahuan kritis. Ini dijadikan pula sebagai studi untuk implementasi, di antaranya juga kaji tindak (*action research*) (Sajogyo, 2006). Tidak mengherankan, pelokalan konsep dan teori dikembangkan sesuai kondisi desa-desa, termasuk menciptakan kategorisasi baru yang lekat di desa. Sejalan dengan pemikiran

⁸ Catatan reflektif perubahan bandul politik direkam Pramoedya Ananta Toer dalam dua jilid buku Nyanyi Sunyi Seorang Bisu (1995, 1997). Lihat juga Pertiwi (2021).

⁹ Sajogyo pada 1998 menolak mengikuti proyek pelaksanaan metode partisipatif yang seragam ke seluruh kecamatan, padahal setahun sebelumnya timnya sukses menyusun kajian dengan metode partisipatif. Kepada penulis—saat itu menjadi asistennya—ia beralasan masyarakat seharusnya hanya memilih metode partisipatif yang sesuai kebutuhannya untuk membangun desa, mustahil dijalankan seragam seindonesia sebagaimana metode survei.

Foucault (2007), arti penting penciptaan taksonomi atau kategorisasi baru ialah mencipta pengetahuan baru yang berujung pada kumulasi kekuasaan ilmuwan. Bahkan, ketika dicipta kategori lapisan sosial terbawah, itu sekaligus menjadi saluran untuk menyuarakan kondisi mereka; dapat diteruskan, penciptaan kategori lapisan terbawah sebagai upaya membuat subaltern berbicara (Spivak, 2021). Dalam pelaksanaan survei, yang terpenting ialah rekategorisasi: menciptakan dan membuat lapisan terbawah ada, dan muncul di permukaan (*emergence of discourse*). Contohnya, dirumuskan Garis Kemiskinan Sajogyo sesuai hasil penelitian gizi keluarga dan survei sosial ekonomi nasional, metode alokasi waktu kegiatan wanita desa, klasifikasi baru petani *gurem*.

Ketiga, ini argumen yang ditulis Sajogyo (2006) sendiri, ada segmen peneliti tidak memperhitungkan kegunaan hasil penelitian, hanya mempertimbangkan pengujian teori dan konsep ilmiah, yaitu selama penulisan skripsi, tesis, dan disertasi –walaupun kini pernyataan aksiologi pemihakan kepada lapisan sosial terbawah ditekankan dalam penulisan tesis dan disertasi.

Aspek aksiologis penting untuk menjaga diskursus sosiologi pedesaan yang tetap memihak golongan terbawah di pedesaan. Ujian perang diskursus ilmu sosial muncul kala Lembaga Penelitian Sosiologi Pedesaan IPB perlu diubah, lalu dipilih nama Pusat Studi Pembangunan pada dekade 1970-an (Sajogyo, 2006). Konsep pembangunan tidak jatuh pada *developmentalisme*, karena sejak awal sengaja dimaknai sebagai studi lintas ilmu (hibridisasi ilmuwan, dan pertemanan diskursus keilmuan), sebagaimana sosiologi pedesaan Indonesia telah dijalankan sejak satu dekade sebelumnya. Tujuannya bukan sekedar modernisasi desa (atau westernisasi desa), melainkan diarahkan mencapai indikasi manfaatnya (termasuk peningkatan kesejahteraan) golongan terbawah dan termarjinalkan di pedesaan (Dahmawan, 2007; Kinseng, 2024): perempuan, golongan miskin, petani *gurem*, masyarakat adat. Kuatnya aksiologi untuk memusatkan tujuan penggalian ilmu sosial mengarahkan sosiologi pedesaan dalam ranah sosiologi terapan, khususnya mencipta kegunaan untuk menguatkan posisi lapisan terbawah masyarakat desa.

Berkembangnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pada dekade 1970-an mengokohkan metode dalam sosiologi pedesaan; inilah jalur agar tidak terkooptasi kekuasaan Rezim Soeharto. Metode-metode partisipatoris diterapkan LSM di antara masyarakat desa, dan pesantren; dan bagi Sajogyo terutama untuk memahami kondisi lapisan terbawah dan termarjinalkan (Sajogyo, 2006). Metode partisipatoris dapat dimaknai perluasan dari hibridisasi ilmu dan ilmuwan sosial, menjadi pertambahan aktor masyarakat di lapangan (hibridisasi akademisi dan masyarakat). Sementara Geertz (1992) menemukan kiai sebagai

jembatan budaya yang mengomunikasikan pesan elite dengan massa, sejak awal penyuluhan hingga praktik metode partisipatoris ditemukan warga desa yang mudah dan terbiasa berkomunikasi dengan beragam posisi sosial di desa alias memiliki jaringan sosial luas (kemudian akademisi menjulukinya jenius lokal). Setelah metode partisipatoris menghasilkan konsensus, gerakan sosial untuk melaksanaan rencana bersama dijalankan dalam kelompok-kelompok swadaya masyarakat.¹⁰ Kelompok dikembangkan dengan relasi tanggung rentang, yang menunjukkan solidaritas seluruh anggota kelompok menanggung resiko bersama atas problem satu atau lebih anggotanya. Sebagai perbandingan, neoliberalisme memandang tanggung rentang mengurangi insentif individu untuk berusaha karena *reward and punishment* tidak dirasakan langsung (Carrol, 2010; Wrihatnolo dan Dwidjowijoto, 2007).

Untuk menguatkan epistemologi pramatis (yang benar adalah hasil konsensus), suatu musyawarah sengaja perlu dihadiri kelompok-kelompok masyarakat dari strata yang berbeda-beda, dari bawah sampai atas, laki-laki dan perempuan (Mubyarto, 1995, 1997; Siregar, 2001). Musyawarah itu menjadi forum dialog antar golongan dan posisi sosial yang berbeda-beda. Warga yang biasa berperan sebagai jenius lokal bisa menjadi fasilitator, atau pihak luar menyediakan pendamping.

Untuk mengontraskan, sebagai perbandingan, lembaga donor seperti Bank Dunia cenderung memisahkan musyawarah perempuan agar tidak dihadiri laki-laki, serta memisahkan musyawarah warga agar tidak dihadiri elite desa.¹¹ Mereka meyakini laki-laki dan elite desa mendominasi ujaran, bahkan membungkam ujaran perempuan dan golongan bawah.

Sementara penyuluhan dimulai dari pihak pembawa inovasi kepada warga, dan fasilitator menekankan peran melancarkan proses-proses sosial, pendamping didefinisikan sebagai pihak yang mendampingi desa secara dinamis. Menggunakan adagium yang diciptakan Ki Hajar Dewantara (Sajogyo, 2006), ada kalanya pendamping bertindak *Ing ngarso sung tulodho* (berposisi di depan untuk memberi contoh baik), *Ing madyo mangun karso* (berposisi di tengah-tengah warga untuk membangun semangat dan mendinamiskan proses sosial), serta *Tut wuri handayani* (aktif di belakang panggung untuk memberikan pemberdayaan hingga warga mampu berdiri di panggung depan).

Metode partisipasi ini didasarkan pemahaman bahwa pengetahuan tidak hanya berpusat dimiliki pihak luar (dulu penyuluhan dalam penyuluhan, atau akademisi dalam kaji tindak

¹⁰ Thomas (2002) mengidentifikasi strategi dinamika kelompok sebagai ciri penting diskursus pembangunan yang berpusat pada rakyat (people-centered development) sebagaimana dipraktikkan sosiologi pedesaan.

¹¹ Terdapat dalam petunjuk teknis operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat sepanjang 2005-2014.

sebagaimana diuraikan Sajogyo, 2006), namun juga dihasilkan oleh warga sendiri. Alhasil, pendamping melakukan kajian bersama masyarakat (*co-operative inquiry*), menghasilkan pengetahuan bersama, yang berarti menghasilkan kekuasaan bersama-sama (Heron, 1996). Siregar (2001) berhasil menjalankan proses partisipatoris di lapangan, kegiatan bersama-sama warga teruji menghasilkan infrastruktur dan lembaga lokal, dan terakhir menuliskan pengalamannya dalam suatu buku. Di akhir buku itu berhasil diabstraksikan diagram hubungan konsep (teori lokal) bersama, sebagai senjata lokal untuk membangun tanpa meresahkan budaya.

Masa Depan Sosiologi Pedesaan: Proposal Struktur Solidaritas Sosial dan Metode Partisipatoris Holistik

Apakah setelah Reformasi 1998, ketika tembok halangan untuk mengkaji ilmu sosial kritis dihancurkan, terbangun teori dan metode poskolonial sosiologi pedesaan ? Yang jelas, pada tahun-tahun awal Reformasi ini mencuat fenomena akademik awal berupa penerbitan terjemahan buku-buku kritis, terutama di Yogyakarta. Muncul pula refleksi relasi pengembangan diskursus pengetahuan dan kekuasaan terutama merefleksikan kondisi semasa rezim Soeharto (Alatas, 2010; Dhakidae, 2003; Hadiz dan Dhakidae, 2005). Terbit pula kajian-kajian lokal, termasuk sejarah-sejarah lokal, juga sejarah sosial dari masa kolonial, dan awal kemerdekaan. Publikasi penting lainnya mencakup kronik dari kliping-kliping masa penjajahan Jepang (Toer, 2022), Revolusi Fisik (Toer, Toer, Kamil, 1999a, 1999b, 2001, 2003, 2014), masa demokrasi terpimpin (Toer, 2019) dan sekitar pembantaian 1965 (Hadi, 2017). Refleksi sosiologi pedesaan juga dilakukan oleh Sajogyo (2006) sendiri, SMP Tjondronegoro (2008), Dharmawan (2007), Kolopaking, Tonny dan Hakim (2020) serta Kinseng (2024).

Yang jelas, kebebasan era Reformasi tidak hanya dimiliki satu pihak, namun juga membebaskan pemikiran semua golongan. Artinya, pada era ini paling tepat dipandang sedang terjadi perang atau kompetisi diskursus-diskursus ilmu sosial.

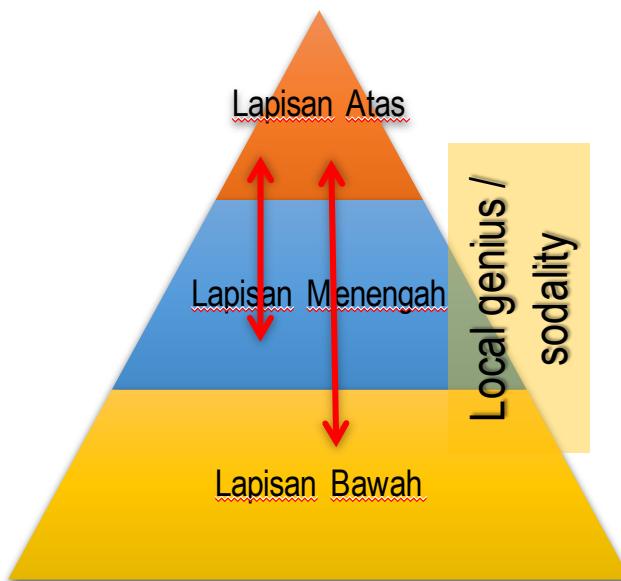
Yang perlu diwaspadai, ketimbang menggunakan konsep paradigma yang meyakini *incommensurability* antar paradigma (Kuhn 2002), di lapangan ditunjukkan diskursus tidaklah mandiri melainkan terbangun lalu terpaut di atas konteks sosial politik (atau tegasnya rezim). Kiranya untuk menjelaskan perkembangan teori sosial, konsep diskursus lebih memadai daripada paradigma. Karena, suatu paradigma bisa berbelok ke ranah paradigma lain pada saat konteks sosial politik berubah, contohnya teori agropolitan yang diciptakan dalam payung paradigma pembangunan yang berpusat pada rakyat (*people-centered development*) berpindah

ke ranah paradigma modernisasi/westernisasi saat dilaksanakan Kementerian Pekerjaan Umum (Agusta, 2008).

Jika mendasarkan pada penilaian Acemoglu dan Robinson (2014), jelas Reformasi tidak membuka ruang naiknya warga biasa menjadi kelas penguasa, agar kelembagaan pembangunan berjalan lebih setara atau demokratis. Yang kini terjadi, elite rezim sebelumnya masih mendominasi kekuasaan. Konsekuensinya, struktur sosial politik negara tidak sepenuhnya aman dan demokratis, sehingga masih perlu penguatan diskursus sosiologi pedesaan agar di masa depan tidak dibelenggu kekuasaan.

Dari perjalanan sosiologi pedesaan, kiranya dapat diajukan aspek ontologis berupa proposal dari struktur sosial, yang dapat diidentifikasi sebagai struktur solidaritas sosial. Ini upaya abstraksi pemikiran khas sosiologi pedesaan, sebagai instrumen untuk menganalisis fakta lapangan di Indonesia. Di dalamnya terbangun hibridisasi konsep struktur hierarkhi dari sosiologi kritis dengan solidaritas sebangsa yang dirintis sejak awal abad ke 20 dan memuncak setelah kemerdekaan memungkasi kolonialisme.

Gambar 1. Struktur Solidaritas Sosial



Struktur sosial semestinya bersifat hierarkhis (yang diakui teori-teori kritis), karena kalau tidak demikian maka sulit menemukan fokus aksiologis, yaitu lapisan terbawah yang termarjinalkan (**Gambar 1**). Hierarkhi sosial tidak selalu terdiri atas dua kelas, melainkan dapat berujud banyak strata (Hayami dan Kikuchi, 1987). Sebagaimana disampaikan di atas, ada waktunya sosiolog menciptakan kategori terbawah, contohnya petani gurem, atau tiga garis

kemiskinan sampai distingtif mengukur gizi warga termiskin (garis terbawah di antara tiga garis) (Sajogyo, 2006).

Hierarkhi sosial tidaklah tertutup, melainkan ada sementara pihak yang mampu berkomunikasi dengan posisi-posisi sosial lintas strata (bukan menekankan konflik antar strata sosial); dari sinilah nama solidaritas sosial diletakkan. Peran solidaritas sosial dijalankan pendamping (juga penyuluhan dan fasilitator) sebagai orang luar, atau kader sebagai orang dalam komunitas itu sendiri (Siregar, 2021). Bahkan, suatu kelembagaan lintas strata bisa dibangun melalui konsep sodality (Tjondronegoro, 1977). Dalam konteks masa kini, struktur solidaritas sosial menggambarkan suatu jaringan sosial (yang lazimnya menisbikan stratifikasi sosial) digambarkan melintasi strata sosial.

Ontologi struktur solidaritas sosial yang diarahkan aksiologi memunculkan lapisan terbawah (sehingga subaltern mampu berbicara (bandingkan Spivak, 2021), minimal melalui publikasi dan seminar riset serta rekomendasi kebijakan), turut mengarahkan metode kajian dengan aksiologi serupa. Kompas aksiologi itulah yang dijalankan baik melalui metode kuantitatif (contohnya riset agroekonomi mengemukakan diskursus petani gurem), metode kualitatif (contohnya riset kelembagaan melahirkan konsep sodality), maupun metode partisipatoris. Bahkan, pada metode partisipatoris sengaja dibangun forum yang dihadiri warga komunitas dari lapisan sosial terbawah hingga lapisan teratas, sehingga dialog lintas posisi sosial terwujud (Siregar, 2001). Kepiawaian pendamping dalam fasilitas forum mampu menyuarakan opini lapisan terbawah yang selama ini tidak didengar (Lubis, akan terbit).

Daftar Pustaka

- Acemoglu, Daron, James A. Robinson. 2014. Mengapa Negara-negara Gagal: Awal Mula Kekuasaan, Kemakmuran, dan Kemiskinan. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Agusta, I. (2008): Lompatan Paradigmatik Program Agropolitan di Indonesia: Dari Paradigma Pembangunan Berbasis Manusia menuju Paradigma Modernisasi. Makalah disampaikan dalam Makalah disampaikan dalam Simposium Nasional Riset dan Kebijakan Ekonomi, Universitas Airlangga, Surabaya, 20-21 Agustus 2008
- Alatas, Syed Farid. 2010. Diskursus Alternatif dalam Ilmu Sosial Asia Tanggapan terhadap Eurosentrisme. Mizan Media Utama
- Alatas, Syed Hussein. 1988. Mitos Pribumi Malas: Citra Orang Jawa, Melayu dan Filipina dalam Kapitalisme Global. Jakarta: LP3ES.
- Baay, R. 2010. Nyai & Pergundikan di Hindia Belanda. Depok: Komunitas Bambu.
- Bel, Jacqueline. 2024. Pemerasan dan Nyanyian Setajam Klewang: Multatuli, *dalam* Rick Honings, Coen van 't Veer, Jacqueline Bel, *eds.* Cermin Poskolonial: Membaca Kembali Sastra Hindia Belanda. Terjemahan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indoonesia.

- Bevins, Vincent. 2023. Metode Jakarta: Amerika Serikat, Pembantaian 1965, dan Dunia Global Kita Sekarang. Terjemahan The Jakarta Method: Washington's Anticommunist Crusade and the Mass Murder Program that Shaped Our World. Jakarta: Marjin Kiri.
- Breman, J. 1997. Menjinakkan Sang Kuli: Politik Kolonial, Tuan Kebun, dan Kuli di Sumatera Timur pada Awal Abad Ke-20. Terjemahan Koelis, Planter en Koloniale Politiek. Jakarta: Grafiti.
- Breman, Jan. 2024. Kolonialisme, Kapitalisme, dan Rasisme: Kronik Pascakolonial. Terjemahan Kolonialisme en Racisme: een Postcoloniale Kroniek. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Carrol, T. 2010. Pembangunan Sosial sebagai "Kuda Troya" Neoliberal, Bank Dunia & Program Pengembangan Kecamatan di Indonesia, *dalam* Prisma Th. 29 No. 3.
- Dhakidae, Daniel. 2003. Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dharmawan, Arya Hadi. 2007. Sistem Penghidupan dan Nafkah Pedesaan: Pandangan Sosiologi Nafkah (*Livelihood Sociology*) Mazhab Barat dan Mazhab Bogor, *dalam* Sodality Vol. 1, No. 2.
- Foucault, M. 2003. Kritik Wacana Bahasa. Terjemahan The Discourse of Power. Yogyakarta: IRCCiSoD
- Foucault, M. 2007. Order of Thing: Arkeologi Ilmu-ilmu Kemanusiaan. Terjemahan The Order of Thing: An Archaeology of Human Sciences oleh B. Priambodo, P. Boy. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Geertz, Clifford. 1992. Kebudayaan dan Agama. Terjemahan. Jakarta: Kanisius.
- Gobee, E, C. Adriaanse. 1990a. Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya kepada Pemerintah Hindia Belanda, 1889-1936, Jilid 1. Jakarta: INIS.
- Gobee, E, C. Adriaanse. 1990b. Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya kepada Pemerintah Hindia Belanda, 1889-1936, Jilid 2. Jakarta: INIS.
- Gobee, E, C. Adriaanse. 1990c. Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya kepada Pemerintah Hindia Belanda, 1889-1936, Jilid 3. Jakarta: INIS.
- Gobee, E, C. Adriaanse. 1991a. Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya kepada Pemerintah Hindia Belanda, 1889-1936, Jilid 4. Jakarta: INIS.
- Gobee, E, C. Adriaanse. 1991b. Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya kepada Pemerintah Hindia Belanda, 1889-1936, Jilid 5. Jakarta: INIS.
- Gobee, E, C. Adriaanse. 1992a. Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya kepada Pemerintah Hindia Belanda, 1889-1936, Jilid 6. Jakarta: INIS.
- Gobee, E, C. Adriaanse. 1992b. Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya kepada Pemerintah Hindia Belanda, 1889-1936, Jilid 7. Jakarta: INIS.
- Gobee, E, C. Adriaanse. 1993a. Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya kepada Pemerintah Hindia Belanda, 1889-1936, Jilid 8. Jakarta: INIS.
- Gobee, E, C. Adriaanse. 1994a. Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya kepada Pemerintah Hindia Belanda, 1889-1936, Jilid 9. Jakarta: INIS.

- Gobee, E, C. Adriaanse. 1994b. Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaianya kepada Pemerintah Hindia Belanda, 1889-1936, Jilid 10. Jakarta: INIS.
- Gobee, E, C. Adriaanse. 1995. Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaianya kepada Pemerintah Hindia Belanda, 1889-1936, Jilid 11. Jakarta: INIS.
- Goss, Andrew. 2014. Belenggu Ilmuwan dan Pengetahuan: Dari Hindia Belanda sampai Orde Baru. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Gouda, F. 2007. Dutch Culture Overseas: Praktik Kolonial di Hindia Belanda, 1900-1942. Terjemahan Dutch Culture Overseas: Colonial Practice in the Netherland Indies 1900-1942. Jakarta: Serambi.
- Hadiz, V.R., D. Dhakidae, eds. 2005. Social Science and Power in Indonesia. Singapore: Equinox dan ISEAS.
- Hayami, Yujiro, Masao Kikuchi. 1987. Dilema Ekonomi Desa: Suatu Pendekatan Ekonomi terhadap Perubahan Kelembagaan di Asia. Terjemahan Asian Village Economy at the Crossroads: an Economic Approach to Institutional Change. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Heron, John. 1996. Co-operative Inquiry: Research into the Human Condition. London: SAGE.
- Ibrahim, Julianto. 2023. Memperebutkan Logistik di Jawa Tengah pada Masa Revolusi, 1945-1950, dalam Bambang Purwanto, et.al., eds, Dunia Revolusi: Persepektif dan Dinamika Lokal pada Masa Perang Kemerdekaan Indonesia, 1945-1949. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kano, Hiroyoshi. 1993. Mobilisasi dan Kontrol, Studi tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942-1945. Terjemahan Mobilization and Control. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Rilus K Kinseng. 2024. The Sajogyo Development Paradigm and its Relevance for the Development of Coastal Areas in Indonesia, dalam Sodality Vol. 12 No. 1 <https://doi.org/10.22500/12202452622>
- Kolopaking, Lala M., Fredian Tonny, Lukman Hakim. 2020. Relevansi Jejak dan Pemikiran Prof. Dr. S.M.P. Tjondronegoro dalam Pendidikan Sosiologi Pedesaan, dalam Sodality Vol. 9 No. 1. <https://doi.org/19.22500/9202135018>.
- Kuhn, Thomas S. 2002. The Structure of Scientific Revolution, Peran Paradigma dalam Revolusi Sains. Terjemahan. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hadi, Kuncoro. 2017. Kronik '65: Catatan Hari Per Hari Peristiwa G30S Sebelum Hingga Setelahnya (1963-1971). Yogyakarta: Media Pressindo.
- Mubyarto. 1995. Iki Duwit Tangkarno, Profil Pokmas IDT Terbaik Penghargaan Presiden dalam Rangka Usia Kencana Republik Indonesia. Jakarta: Bappenas.
- Mubyarto. 1997. IDT dan Program Menghapus Kemiskinan. Yogyakarta: Aditya Media
- Multatuli. 1972. Max Havelaar atau Lelang Kopi Persekutuan Dagang Belanda. Terjemahan. Jakarta: Djambatan.
- Neelakantan, Vivek. 2017. Science, Public Health and Nation-Building in Soekarno-Era Indonesia. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholar Publishing.
- Pertiwi, Dhianita Kusuma. 2021. Mengenal Orde Baru. Yogyakarta: Buku Mojok Group.
- Purwanto, Bambang. 2016. Bertram Johannes Otto Schrieke dan Kajian Historis-Sosiologis dalam Historiografi Indonesia. Kata Pengantar dalam BJO Schrieke. 2016a. Kajian Historis Sosiologis Masyarakat Indonesia, Jilid 1. Terjemahan. Yogyakarta: Ombak.
- Sajogyo. 2006. Ekososiolegi, Deideologi Teori, Restrukturisasi Aksi (Petani dan Perdesaan sebagai Kasus Uji). Yogyakarta: Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas.
- Schrieke, BJO. 2016a. Kajian Historis Sosiologis Masyarakat Indonesia, Jilid 1. Terjemahan Indonesian Sociological Studies: Selected Writings of B Schrieke. Yogyakarta: Ombak.

- Schrieke, BJO. 2016b. Kajian Historis Sosiologis Masyarakat Indonesia, Jilid 2. Terjemahan Indonesian Sociological Studies: Selected Writings of B Schrieke. Yogyakarta: Ombak.
- Siregar, Budi Baik. 2001. Menelusuri Jejak Ketertinggalan. Bogor: Pusat P3R-YAE.
- Spivak, Gayatri Chakravorty. 2021. Dapatkah Subaltern Berbicara? Yogyakarta: Circa.
- Thomas, A. 2002. Meanings and Views of Development, *dalam* T. Allen, A. Thomas, *eds.* Poverty and Development: Into the 21st Century. Oxford: Oxford Univ. Pr.
- Tjondronegoro, SMP. 1977. The Organizational Phenomenon and Planned Development in Rural Communities of Java: A Case Study of Kec. Cibadak, West Java, and Kec. Kendal, Central Java. Disertasi di Universitas Indonesia, Jakarta.
- Tjondronegoro, SMP. 2008. Mencari Ilmu di Tiga Zaman dan Tiga Benua: Otobiografi Prof. Dr. Sediono M.P. Tjondronegoro. Bogor: Penerbit SAINS.
- Toer, Koesalah Soebagyo. 2019. Kronik Abad Demokrasi Terpimpin. Blora: Pataba, Kendi dan Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat.
- Toer, Koesalah Soebagyo. 2022. Kronik Abad Penjajahan Jepang. Blora: Pataba dan Kendi.
- Toer, Pramoedya Ananta. 1988. Rumah Kaca. Jakarta: Hasta Mitra.
- Toer, Pramoedya Ananta. 1995. Nyanyi Sunyi Seorang Bisu. Jakarta: Lentera.
- Toer, Pramoedya Ananta. 1997. Nyanyi Sunyi Seorang Bisu II. Jakarta: Lentera.
- Toer, Pramoedya Ananta. 2000. Gadis Pantai. Jakarta: Lentera Dipantara.
- Toer, Pramoedya Ananta. 2002. Anak Semua Bangsa. Jakarta: Hasta Mitra.
- Toer, Pramoedya Ananta. 2002. Bumi Manusia. Jakarta: Hasta Mitra.
- Toer, Pramoedya Ananta. 2002. Jejak Langkah. Jakarta: Hasta Mitra.
- Toer, Pramoedya Ananta. 2003. Panggil Aku Kartini Saja. Jakarta: Lentera Dipantara.
- Toer, Pramoedya Ananta. 2003. Sang Pemula. Jakarta: Lentera Dipantara.
- Toer, Pramoedya Ananta, Koesalah Soebagyo Toer, Ediati Kamil. 1999a. Kronik Revolusi Indonesia Jilid 1 (1945). Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Toer, Pramoedya Ananta, Koesalah Soebagyo Toer, Ediati Kamil. 1999b. Kronik Revolusi Indonesia Jilid 2 (1946). Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Toer, Pramoedya Ananta, Koesalah Soebagyo Toer, Ediati Kamil. 2001. Kronik Revolusi Indonesia Jilid 3 (1947). Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Toer, Pramoedya Ananta, Koesalah Soebagyo Toer, Ediati Kamil. 2003. Kronik Revolusi Indonesia Jilid 4 (1948). Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Toer, Pramoedya Ananta, Koesalah Soebagyo Toer, Ediati Kamil. 2014. Kronik Revolusi Indonesia Jilid 5 (1949). Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- van Leur, JC. 2015. Perdagangan dan Masyarakat Indonesia, Esai-esai tentang Sejarah Sosial dan Ekonomi Asia. Terjemahan Indonesian Trade and Society, Essays in Asian Social and Economic History. Yogyakarta: Ombak
- Wertheim, WF. 1999. Masyarakat Indonesia dalam Transisi, Studi Perubahan Sosial Terjemahan Indonesian Society in Transition, a Study of Social Change. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Wertheim, WF. 2009. Elite versus Massa. Terjemahan. Yogyakarta: Resist Book.
- Wertheim, WF. Tt. Gelombang Pasang Emansipasi: Evolusi dan Revolusi yang Diperbarui. Terjemahan De lage mars der emancipatie: Herziene druk van evolutie en revolutie. Jakarta: Garba Budaya dan ISAI.
- White, B. 2005. Between Apologia and Critical Discourse: Agrarian Transitions and Scholarly Engagement in Indonesia, *dalam* V.R. Hadiz, D. Dhakidae, *eds.* Social Science and Power in Indonesia. Singapore: Equinox dan ISEAS.
- Wrihatnolo, Randy R., Riant Nugroho Dwidjowijoto. 2007. Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Elex Media Komputindo.